



## Pemerataan Bantuan Sosial melalui Sistem Pemerintahan Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Nining Lestari Da Silva<sup>1</sup>, Brampi Soniman Sae<sup>2</sup>, Intan Yulintri Sopaba<sup>3</sup>, Welmi Ananda Ngongo<sup>4</sup>, Denil Ngginak<sup>5</sup>, Fadil Mas'ud<sup>6</sup>

Universitas Nusa Cendana, Indonesia<sup>1-6</sup>

Email Korespondensi : [ninglestaridasilva@gmail.com](mailto:ninglestaridasilva@gmail.com), [sonysae483@gmail.com](mailto:sonysae483@gmail.com),  
[intansopaba0@gmail.com](mailto:intansopaba0@gmail.com), [welmiananda6@gmail.com](mailto:welmiananda6@gmail.com), [denilngginak602@gmail.com](mailto:denilngginak602@gmail.com),  
[fadil.masud@staf.undana.ac.id](mailto:fadil.masud@staf.undana.ac.id)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 11 Mei 2026

### ABSTRACT

*This study aims to explore the role of the local government system in supporting the equitable distribution of social assistance and to analyze the factors influencing its success in South Central Timor Regency. The research employs a qualitative method with descriptive-analytical characteristics, utilizing a literature review of various sources such as academic journals, official documents, and relevant news articles. The research findings indicate that the local government serves as the primary implementer in the stages of data collection, verification, delivery, and monitoring of social assistance. However, on the ground, there remain several issues, such as inaccuracies in recipient data, limited institutional capacity, and the complexity of the community's geographical and social conditions. Additionally, the effectiveness of social assistance distribution is affected by policies that are not yet fully transparent, low administrative capacity, and a lack of community participation and understanding. Therefore, strategic measures are needed to strengthen governance, enhance institutional capacity, leverage digital technology, and actively involve the community in oversight. With these measures, the distribution of social assistance in South Central Timor Regency is expected to be carried out more fairly, transparently, and effectively to achieve community welfare and social justice.*

**Keywords:** *Equitable Distribution of Social Assistance, Local Government, Social Justice, Social Assistance Distribution, South Central Timor Regency.*

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran sistem pemerintahan daerah dalam mendukung distribusi bantuan sosial yang merata serta menganalisis elemen-elemen yang memengaruhi keberhasilannya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Metode yang diterapkan adalah kualitatif dengan karakteristik deskriptif-analitis, menggunakan studi pustaka dari berbagai referensi seperti jurnal akademis, dokumen resmi, dan berita yang terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah berfungsi sebagai pelaksana utama dalam tahapan pendataan, verifikasi, pengiriman, dan pengawasan bantuan sosial. Namun, di lapangan masih terdapat sejumlah masalah, seperti ketidakakuratan data penerima, kapasitas kelembagaan yang terbatas, serta kompleksitas kondisi geografis dan sosial masyarakat. Selain itu, efektivitas distribusi bantuan sosial terpengaruh oleh kebijakan yang belum sepenuhnya transparan, kapasitas aparatur yang masih rendah, serta kurangnya partisipasi dan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan,*

---

*meningkatkan kapasitas kelembagaan, memanfaatkan teknologi digital, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan. Dengan langkah-langkah tersebut, distribusi bantuan sosial di Kabupaten Timor Tengah Selatan diharapkan dapat dilakukan secara lebih adil, transparan, dan tepat sasaran demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.*

**Kata Kunci:** *Pemerataan Bantuan Sosial, Pemerintahan Daerah, Keadilan Sosial, Distribusi Bansos, Kabupaten Timor Tengah Selatan.*

## PENDAHULUAN

Penyebaran bantuan sosial merupakan salah satu alat vital dalam kebijakan publik yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil. Di negara berkembang seperti Indonesia, program bantuan sosial menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem perlindungan sosial yang dirancang untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan dan kurang beruntung. Bantuan sosial bukan hanya berfungsi sebagai solusi sementara untuk mengatasi efek kemiskinan, tetapi juga sebagai pendekatan jangka panjang dalam membangun keadilan sosial dan pembangunan yang mencakup semua. Penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, meskipun tingkat keberhasilannya dapat bervariasi di berbagai daerah (Sabila, 2025). Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan program bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang disediakan, tetapi juga oleh ketepatan desain kebijakan dan kemampuan pelaksanaan di tingkat daerah yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

Konsep keadilan sosial dalam penyaluran bantuan dapat dipahami dari sudut pandang keadilan distribusi dan keadilan prosedur. Keadilan distribusi berfokus pada sejauh mana bantuan diberikan secara seimbang kepada mereka yang memerlukan, sementara keadilan prosedur menekankan pentingnya proses penyaluran yang terbuka dan adil. Penelitian mengungkapkan bahwa kedua jenis keadilan ini, baik distribusi maupun prosedur, berperan vital dalam membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang diimplementasikan (Masud, 2020). Konsep ini memiliki kaitan yang erat dengan tema bantuan sosial di wilayah, karena masalah bansos tidak hanya berkaitan dengan besaran bantuan yang diterima, tetapi juga mengenai cara distribusi yang berlangsung secara adil dan transparan. Dengan demikian, penerapan asas keadilan distributif dan prosedural menjadi dasar yang penting untuk mencapai pemerataan bantuan sosial yang adil. Prinsip distribusi bantuan sosial juga sejalan dengan ide pembagian kesejahteraan dalam pengelolaan dana sosial masyarakat. Pengelolaan dana sosial yang dilakukan dengan baik dan sesuai sasaran dapat mendukung pemerataan pendapatan serta menjadi solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan (Masud, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas bantuan sosial sangat bergantung pada ketepatan sasaran, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat rentan.

---

Namun, dalam pelaksanaannya, distribusi bantuan sosial tetap menghadapi beragam tantangan yang kompleks. Beberapa masalah yang sering muncul termasuk ketidakakuratan dalam penentuan penerima bantuan, masalah kualitas dan ketersediaan data, serta hambatan dalam proses penyaluran yang mengakibatkan ketidakmerataan bantuan. Contohnya, program bantu sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) seringkali menemui tantangan terkait aksesibilitas, terutama di daerah yang memiliki kondisi geografis yang sulit dan infrastruktur yang terbatas (Pahrudin dkk., 2024). Selain itu, masih ada kesenjangan dalam penyaluran bantuan yang bisa menimbulkan rasa cemburu sosial di kalangan masyarakat. Masalah ini menunjukkan bahwa sistem pencatatan dan cara pengiriman bantuan sosial masih memerlukan perbaikan yang mendalam, baik melalui pembaruan data secara rutin, penggunaan teknologi informasi, maupun peningkatan keterbukaan dalam proses penyaluran bantuan.

Lebih jauh, keberhasilan pelaksanaan program bantuan sosial di wilayah juga sangat dipengaruhi oleh faktor kebijakan, administrasi, serta kemampuan lembaga pemerintah daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam melakukan pengumpulan data, verifikasi, validasi, hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat yang memenuhi syarat. Penelitian membuktikan bahwa kemampuan lembaga dan mutu pengelolaan pemerintahan daerah sangat berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial (Maharsani, 2022). Ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan pegawai pemerintah daerah, terutama dalam manajemen data dan layanan publik, adalah elemen penting yang perlu diperhatikan untuk memperbaiki kualitas penyaluran bantuan sosial.

Dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah mempunyai hak yang besar dalam mengatur urusan pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Pemerintah daerah berfungsi sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa bantuan sosial disalurkan dengan tepat dan merata. Di samping itu, kemajuan kebijakan bantuan sosial yang berbasis digital juga merupakan salah satu terobosan untuk meningkatkan transparansi dan ketepatan data penerima bantuan (J, 2025). Digitalisasi dalam pengelolaan bantuan sosial adalah langkah maju untuk memperbaiki cara distribusi, tetapi pelaksanaannya harus didukung oleh kesiapan infrastruktur teknologi serta peningkatan pengetahuan digital bagi masyarakat dan pejabat pemerintah daerah. Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki ciri yang cukup rumit dalam pelaksanaan distribusi bantuan sosial. Dengan kondisi geografis yang luas, akses yang terbatas, infrastruktur yang belum merata, serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, terdapat tantangan khusus dalam proses penyaluran bantuan sosial (Shoemith dkk., 2020). Hal ini sesuai dengan studi yang mengindikasikan bahwa wilayah terbelakang seperti Timor Tengah Selatan masih mengalami kendala dalam kemampuan pemerintahan, sumber daya, dan infrastruktur, yang berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial. Di samping itu, keadaan sosial ekonomi warga yang masih membutuhkan perhatian, seperti tingginya tingkat stunting dan minimnya akses terhadap pangan, juga menunjukkan bahwa intervensi bantuan

sosial sangat diperlukan di daerah ini (Fallo, 2020). Dalam implementasinya, distribusi bantuan sosial di Kabupaten Timor Tengah Selatan juga mengalami berbagai perubahan dan tantangan. Pemerintah setempat terus berusaha untuk memberikan bantuan makanan dan program sosial lainnya sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terlihat dari peluncuran program bantuan pangan untuk tahun 2026 yang ditujukan kepada mereka yang membutuhkan (Kompas86.com, 2026). Selain itu, berbagai jenis dukungan sosial juga diberikan untuk menjangkau berbagai kalangan masyarakat, baik dalam wujud kebutuhan dasar maupun bantuan untuk sektor kesehatan dan pendidikan (jpnn.com, 2026). Namun, di sisi lain, masih ada isu yang muncul dalam pelaksanaan bantuan sosial, seperti indikasi penyalahgunaan dalam penyaluran bantuan yang menunjukkan adanya kekurangan dalam pengawasan dan manajemen (KORANTIMOR.COM, 2025). Selain itu, aspek sosial seperti tingkat pendidikan, kesadaran masyarakat, dan dinamika interaksi sosial di tingkat lokal juga memengaruhi keberhasilan penyaluran bantuan. Dalam situasi ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial untuk menjamin bahwa bantuan sosial dapat menjangkau semua kelompok masyarakat yang membutuhkan dengan adil dan merata. Diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperhitungkan aspek sosial dan budaya masyarakat lokal agar program bantuan sosial dapat berjalan dengan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan, serta mampu menangani berbagai masalah yang muncul dalam praktik distribusinya di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan secara lebih mendalam dalam bentuk pertanyaan, yaitu (1). Bagaimana peran sistem pemerintahan daerah dalam mewujudkan pemerataan bantuan sosial di Kabupaten Timor Tengah Selatan? (2). Sejauh mana kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan kondisi sosial masyarakat memengaruhi efektivitas distribusi bantuan sosial serta bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kendala agar penyaluran bantuan sosial dapat berjalan secara adil, transparan, dan tepat sasaran?

## METODE

Penelitian ini mengangkat metode kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis untuk menganalisis fenomena distribusi bantuan sosial melalui sistem pemerintahan daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Metode ini dipilih karena dapat memberikan wawasan yang mendalam terkait realitas sosial, kebijakan publik, dan dinamika pelaksanaan bantuan sosial dalam masyarakat. Selain itu, pendekatan kualitatif juga memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengerti proses, makna, dan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan distribusi bantuan sosial secara lebih menyeluruh. Data yang dipakai dalam kajian ini adalah data sekunder yang diambil dari artikel ilmiah, buku, dokumen resmi dari pemerintah, serta berita yang relevan dengan tema distribusi bantuan sosial, terutama di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur, yakni dengan mempelajari berbagai sumber yang dapat

dipercaya dan berhubungan dengan masalah distribusi bantuan sosial, kebijakan dari pemerintah daerah, serta keadaan sosial ekonomi masyarakat.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan model interaktif yang terdiri dari tiga langkah utama, yaitu pengurangan data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi (Milles, 2023). Pengurangan data dilakukan dengan memilih dan merampingkan data yang berkaitan dengan inti penelitian. Kemudian, data dipresentasikan dalam narasi yang teratur agar lebih mudah dimengerti. Langkah terakhir adalah pengambilan kesimpulan yang dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian agar menemukan hasil yang sah. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi yang berasal dari jurnal, dokumen resmi, serta sumber berita yang relevan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan lebih bersifat objektif, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan prinsip-prinsip analisis data kualitatif yang terstruktur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Peran Sistem Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Pemerataan Bantuan Sosial di Kabupaten Timor Tengah Selatan*

Sistem pemerintahan lokal memiliki fungsi yang sangat penting dalam mencapai distribusi bantuan sosial secara merata, terutama di wilayah yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang rumit seperti Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah berperan tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat, tetapi juga sebagai pihak utama yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, penyesuaian, dan memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang memerlukan dengan adil dan merata. Peran ini meliputi berbagai tahap, mulai dari perencanaan program, pencatatan penerima, verifikasi serta validasi data, hingga distribusi dan pengawasan pelaksanaan bantuan sosial di lapangan.

Dalam pandangan keadilan sosial, fungsi pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan sosial juga sangat berkaitan dengan upaya menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban masyarakat. Keadilan tidak hanya diukur dari hasil distribusi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menyediakan akses yang setara untuk semua masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakmerataan dalam distribusi dapat menghambat terwujudnya keadilan sosial yang signifikan (FADIL dkk., 2024). Hal ini menekankan bahwa pemerintah daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan harus dapat memastikan bahwa setiap kebijakan bantuan sosial tidak hanya mengenai sasaran yang tepat, tetapi juga dapat mengakses kelompok masyarakat yang selama ini sulit dijangkau, sehingga keadilan sosial dapat benar-benar terwujud.

Salah satu hal terpenting dalam peran pemerintah daerah adalah pengelolaan data penerima bantuan sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS menjadi fondasi utama dalam menentukan siapa saja yang mendapatkan bantuan sosial, sehingga kualitas data sangat berpengaruh terhadap keberhasilan

---

program bansos. Penelitian menunjukkan bahwa masalah utama dalam distribusi bansos sering kali disebabkan oleh ketidakakuratan data, yang menyebabkan terjadinya kesalahan inklusi (penerima yang tidak berhak) dan kesalahan eksklusi (masyarakat yang berhak tetapi tidak mendapatkan bantuan) (Setiadi dkk., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah, terutama di Kabupaten Timor Tengah Selatan, perlu memperkuat sistem pengumpulan data yang berbasis lokal dengan melibatkan aparat desa serta masyarakat secara langsung agar informasi yang diperoleh menjadi lebih valid, tepat, dan sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Selain itu, pemanfaatan DTKS sebagai patokan nasional dalam penyaluran bantuan sosial juga menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya di tingkat daerah. Penyebabnya adalah perubahan dinamis dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat, sementara pembaruan data tidak selalu dilakukan dengan cepat dan teratur. Oleh karena itu, terdapat kecocokan yang kurang antara data yang dipakai dengan situasi nyata masyarakat (Sintha, 2024). Permasalahan ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan sistem DTKS dengan cara pemutakhiran data yang berkelanjutan di level daerah, agar pemerintah setempat dapat lebih tanggap terhadap perubahan keadaan masyarakat, terutama di area dengan tingkat kerentanan yang tinggi seperti Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Keterlibatan pemerintah daerah sangat jelas terlihat dalam proses penyaluran bantuan sosial, yang melibatkan banyak pihak mulai dari dinas sosial, pemerintah kecamatan, hingga aparat desa. Penyaluran bantuan sosial bukan semata-mata masalah teknis, tetapi juga berkaitan dengan koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam implementasinya. Penelitian menunjukkan bahwa berbagai faktor seperti jumlah sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau memengaruhi kompleksitas dalam penyaluran bantuan sosial (Muchtar, t.t.). Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan harus menciptakan sistem koordinasi yang lebih solid dan menyeluruh, serta meningkatkan kapabilitas pegawai agar dapat melaksanakan tugas distribusi bantuan sosial dengan baik meskipun di tengah berbagai kendala yang ada. Di samping faktor administratif dan koordinasi, penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan bantuan sosial juga merupakan salah satu inovasi yang diusung oleh pemerintah untuk memperbaiki efektivitas program bantuan sosial. Sistem yang berbasis digital memungkinkan proses pencatatan dan distribusi dilakukan dengan lebih transparan dan tepat, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan (Maharsani, 2022). Digitalisasi sistem bantuan sosial adalah langkah yang sangat penting di zaman sekarang, namun pelaksanaannya di Kabupaten Timor Tengah Selatan harus disesuaikan dengan keadaan infrastruktur dan kemampuan sumber daya manusia agar tidak menimbulkan kesenjangan baru dalam akses terhadap bantuan sosial.

Selain itu, dalam hal distribusi bantuan sosial, prinsip keadilan tidak hanya berkaitan dengan hasil yang dicapai, tetapi juga dengan proses yang ditempuh. Keadilan distributif fokus pada keselarasan antara kebutuhan komunitas dan bantuan yang diberikan, sementara keadilan prosedural menekankan pentingnya

transparansi dan keadilan dalam cara distribusi dilakukan. Penelitian menunjukkan bahwa kedua aspek ini memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan (Masud, 2020). Dalam konteks Kabupaten Timor Tengah Selatan, penerapan kedua prinsip tersebut sangat krusial karena adanya keragaman sosial di masyarakat dan kemungkinan munculnya konflik sosial jika distribusi bantuan dianggap tidak adil. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa distribusi bantuan sosial tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga dilaksanakan dengan prosedur yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika dianalisis lebih mendalam dalam konteks Kabupaten Timor Tengah Selatan, fungsi pemerintahan daerah dalam menyebarkan bantuan sosial masih mengalami kendala baik dari segi struktur maupun budaya. Dari sisi struktural, kurangnya infrastruktur seperti jalan dan sarana komunikasi menghalangi pengiriman bantuan ke daerah-daerah yang jauh. Di sisi lain, dari segi budaya, ada faktor sosial seperti rendahnya pendidikan dan minimnya pemahaman masyarakat mengenai cara kerja bantuan sosial yang dapat memengaruhi keberhasilan program bantuan sosial. Dalam situasi ini, pemerintah lokal dituntut untuk tidak sekadar melaksanakan tugas administratif, namun juga mampu mengembangkan pendekatan yang lebih sesuai dengan konteks dan melibatkan masyarakat. Ini bisa dicapai dengan melibatkan tokoh masyarakat, meningkatkan keterbukaan informasi, dan memperkuat mekanisme pengawasan di tingkat lokal. Melalui pendekatan yang lebih inklusif, diharapkan program bantuan sosial akan lebih diterima dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Peran sistem pemerintahan daerah dalam mencapai distribusi bantuan sosial yang merata harus dipahami sebagai proses yang bersifat dinamis dan berkelanjutan. Pemerintah daerah tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan bantuan, tetapi juga harus memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan, data yang tepat, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat sangat penting agar distribusi bantuan sosial di Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat berjalan dengan optimal dan adil.

### ***Kebijakan, Kapasitas Kelembagaan, Dan Kondisi Sosial Masyarakat Memengaruhi Efektivitas Distribusi Bantuan Sosial Serta Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kendala Agar Penyaluran Bantuan Sosial Dapat Berjalan Secara Adil, Transparan, Dan Tepat Sasaran***

Efektivitas pengiriman bantuan sosial pada dasarnya adalah hasil dari interaksi antara kebijakan yang dibuat, kemampuan lembaga yang melaksanakannya, dan situasi sosial masyarakat yang menjadi target program. Di kawasan Kabupaten Timor Tengah Selatan, ketiga elemen ini memiliki dampak yang sangat berarti mengingat karakter wilayah yang luas, tantangan dari kondisi geografis, serta tingkat kesejahteraan warga yang masih cukup rendah. Oleh sebab itu, untuk memahami seberapa berhasil distribusi bantuan sosial, diperlukan analisis yang menyeluruh terhadap ketiga faktor tersebut secara menyeluruh.

---

Dari sudut pandang kebijakan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola bantuan sosial melalui alat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan bantuan sosial seharusnya dirancang dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, keterbukaan, dan akuntabilitas agar dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Namun, dalam penerapannya, masih terdapat berbagai masalah yang menghalangi efektivitas kebijakan ini. Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengeluaran bantuan sosial di daerah kerap kali menemui hambatan dalam hal pertanggungjawaban dan keterbukaan, sehingga berisiko mengakibatkan ketidakakuratan sasaran dan penyalahgunaan anggaran (Manik, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan bantuan sosial di daerah masih kurang didukung oleh sistem pengelolaan yang kuat dan mekanisme pengawasan yang efisien. Maka dari itu, perlu dilakukan penguatan pada regulasi, peningkatan transparansi anggaran, dan penerapan prinsip pemerintahan yang baik agar kebijakan bantuan sosial dapat dilaksanakan dengan efektif dan adil. Konsep penyaluran bantuan sosial memiliki kesamaan dengan cara distribusi dana sosial lainnya, seperti zakat, yang menekankan pada prinsip keadilan, pemerataan, dan manfaat bagi masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa untuk mengoptimalkan distribusi dana zakat, diperlukan sistem pengelolaan yang terencana, transparan, dan berbasis pada kebutuhan penerima manfaat (Mas'ud, 2024). Hal ini menandakan bahwa dasar-dasar dalam pengelolaan zakat bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan sistem penyaluran bantuan sosial, terutama dalam menjamin bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada kelompok yang memerlukan dengan cara yang tepat dan berkelanjutan.

Selanjutnya, dari sisi kapasitas lembaga, keberhasilan penyaluran bantuan sosial sangat tergantung pada kemampuan aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Kapasitas ini mencakup kemampuan untuk mengelola data, memverifikasi penerima, menyalurkan bantuan, serta mengawasi pelaksanaan program. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun program bantuan sosial telah berjalan dengan cukup baik, masih ada berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, seperti keterlambatan dalam distribusi, jumlah bantuan yang tidak sesuai, dan kendala administratif di tingkat pelaksana (Dinanti & Aini, t.t.). Keadaan ini menunjukkan bahwa kapasitas lembaga pemerintah daerah masih perlu diperbaiki dengan serius, terutama melalui peningkatan kemampuan pegawai, penyederhanaan langkah-langkah birokrasi, dan penguatan sistem kerja sama antar lembaga, agar proses penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung dengan lebih cepat, akurat, dan efisien.

Selain itu, kondisi sosial masyarakat juga berperan penting dalam menentukan seberapa efektif bantuan sosial didistribusikan. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, kesadaran masyarakat, dan akses terhadap informasi menjadi kunci dalam proses penerimaan bantuan tersebut. Masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mendapatkan informasi atau pemahaman sering kali tidak menyadari prosedur atau hak mereka dalam menerima bantuan sosial. Di samping itu, terkadang, dinamika sosial seperti hubungan antar keluarga atau kedekatan

dengan pihak berwenang dapat memengaruhi siapa yang menerima bantuan, sehingga berisiko menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian bantuan sosial.

Dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut, pemerintah setempat harus melakukan serangkaian langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial. Salah satu langkah yang cukup penting adalah dengan menerapkan digitalisasi dalam sistem bantuan sosial. Digitalisasi memungkinkan proses pengumpulan data, verifikasi, dan penyaluran bantuan dilakukan dengan cara yang lebih transparan, tepat, dan efisien. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital dalam penyelenggaraan bantuan sosial dapat meningkatkan tanggung jawab serta mengurangi risiko kesalahan dalam penyaluran, meskipun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya (Prasetyo dkk., 2024). Digitalisasi adalah langkah yang sangat penting dan strategis untuk memperbaiki sistem bantuan sosial, tetapi keberhasilannya sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi dan kemampuan sumber daya manusia di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa proses transformasi digital dilakukan secara bertahap serta diiringi dengan peningkatan kapasitas pegawai dan literasi digital masyarakat.

Selain digitalisasi, usaha lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bantuan sosial. Pemerintah daerah harus menyediakan akses informasi mengenai daftar penerima bantuan, cara distribusi, serta penggunaan anggaran agar masyarakat dapat turut serta dalam memantau jalannya program bansos. Dengan adanya keterbukaan, kemungkinan terjadinya penyimpangan dapat dikurangi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat bertambah. Selanjutnya, pemerintah daerah juga harus mengembangkan pendekatan yang lebih sesuai dengan konteks dan berbasis pada kebutuhan lokal, terutama di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ini dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, serta lembaga setempat dalam proses pengumpulan data dan distribusi bantuan sosial. Pendekatan ini sangat penting agar kebijakan yang diambil benar-benar cocok dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial dapat dipahami sebagai salah satu aspek dari isu struktural dalam pembangunan, di mana ketidakadilan dalam akses dan keterbatasan kapasitas menjadi halangan utama. Penelitian mengungkapkan bahwa pembangunan yang tidak seimbang akan mempengaruhi rendahnya efektivitas program-program kesejahteraan sosial, termasuk dalam hal bantuan sosial (FADIL dkk., 2025). Ini menunjukkan bahwa usaha untuk memperbaiki distribusi bantuan sosial tidak bisa dilakukan secara terpisah, melainkan perlu digabungkan dengan kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh, yang mencakup peningkatan infrastruktur, akses pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Efektivitas penyaluran bantuan sosial tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan satu faktor, melainkan memerlukan kerjasama antara kebijakan yang sesuai, kemampuan lembaga yang solid, dan kondisi sosial masyarakat yang mendukung. Pemerintah daerah perlu menggabungkan ketiga elemen tersebut ke dalam satu sistem yang terencana dan berkelanjutan. Dengan cara ini, penyaluran

---

bantuan sosial di Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak hanya akan menjadi aktivitas administratif, tetapi juga benar-benar dapat memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial secara menyeluruh. Di samping itu, pendekatan kewarganegaraan menjadi elemen yang signifikan untuk meningkatkan efektivitas dalam distribusi bantuan sosial. Dari sudut pandang pendidikan kewarganegaraan, masyarakat tidak hanya dilihat sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor aktif yang memiliki hak dan tanggung jawab dalam mengawasi kebijakan publik. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas program yang dijalankan. Dalam situasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, penerapan metode ini sangat krusial karena dapat mendorong warga untuk lebih peka terhadap hak mereka dalam menerima bantuan sosial dan berkontribusi dalam pengawasan proses distribusi. Dengan keterlibatan masyarakat, peluang terjadinya penyimpangan dapat dikurangi dan pembagian bantuan sosial bisa berlangsung dengan lebih adil dan terbuka.

## SIMPULAN

Berdasarkan kajian dan perbincangan mengenai penyebaran bantuan sosial melalui sistem pemerintah daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah sangat krusial dalam menciptakan distribusi bantuan sosial yang merata dan adil. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai entitas utama yang bertanggung jawab dalam proses pengumpulan data, verifikasi, distribusi, dan pengawasan bantuan sosial. Keberhasilan dalam penyebaran bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh kualitas data, terutama melalui pemanfaatan DTKS, kerjasama antar lembaga, serta kemampuan aparat dalam mengelola program dengan efisien. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ada berbagai tantangan seperti ketidakakuratan data, lemahnya infrastruktur, serta faktor sosial dan geografis masyarakat yang kompleks, sehingga distribusi bantuan belum sepenuhnya merata dan tepat guna.

Selanjutnya, efektifitas dalam menyalurkan bantuan sosial dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu aturan, kemampuan lembaga, dan keadaan sosial masyarakat. Aturan yang belum sepenuhnya terang dan bertanggung jawab, kapasitas aparat yang masih terbatas, serta kurangnya akses informasi dan kesadaran masyarakat menjadi penghalang dalam pelaksanaan bantuan sosial. Karena itu, diperlukan tindakan strategis dari pemerintah daerah, seperti penguatan sistem manajemen, peningkatan kemampuan institusi, pemanfaatan teknologi digital, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan adanya kerja sama antara kebijakan yang sesuai, institusi yang kokoh, dan partisipasi masyarakat, diharapkan distribusi bantuan sosial di Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat berlangsung dengan lebih adil, terbuka, dan tepat sasaran, serta mampu mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial yang berkelanjutan.

---

---

**DAFTAR RUJUKAN**

- Dinanti, M. P., & Aini, Z. (t.t.). *Tinjauan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial Aceh*.
- FADIL, M., Ariana, S. R., Agni, P. M., Dewi, N. C., Mau, G. C., Nenotek, N. Y., Dere, P. S., & Nassa, D. Y. (2024). *Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kupang)*. 03(02).
- FADIL, M., Sapay, Y. A., Pandu, G. L., Nuak, A. S., Indah, E. Y., & Kian, S. L. A. (2025). Kebijakan Pemangkasan Anggaran di Indonesia: Efisiensi Fiskal dan Kepentingan Politik. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(3), 312–327. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i3.297>
- Fallo, A. R. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DI KECAMATAN KIE. *GLORY Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 1(2), 1–21. <https://doi.org/10.35508/glory.v1i2.3365>
- J, S. (2025). Analisis Kebijakan Bantuan Sosial terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Digital Kabupaten Sijunjung. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 7688–7696. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3144>
- jpnn.com. (2026). Panitia Natal Nasional 2025 Salurkan Bansos Rp 4 Miliar untuk Masyarakat NTT. *jpnn.com*. <https://www.jpnn.com/news/panitia-natal-nasional-2025-salurkan-bansos-rp-4-miliar-untuk-masyarakat-ntt?>
- Kompas86.com. (2026). Bupati TTS, Resmi Melaunching Bantuan Pangan Tahun 2026 Kepada Masyarakat. *Kompas86.com*. <https://www.kompas86.com/berita/3002571957/bupati-tts-resmi-melaunching-bantuan-pangan-tahun-2026-kepada-masyarakat?>
- KORANTIMOR.COM. (2025). Dinsos TTS Telah Lakukan BAP Terhadap Dua TKSK Terkait Dugaan Penyalahgunaan Beras Bantuan yang Diganti Karung Kosong untuk Foto. *KORANTIMOR.COM*. <https://www.korantimor.com/soe/1546672199/dinsos-tts-telah-lakukan-bap-terhadap-dua-tksk-terkait-dugaan-penyalahgunaan-beras-bantuan-yang-diganti-karung-kosong-untuk-foto?>
- Maharsani, T. H. (2022a). Implementasi Kebijakan Sosial Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Daerah melalui Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Klaten sebagai Upaya Menekan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(2), 129–140. <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i2.40657>
- Maharsani, T. H. (2022b). Implementasi Kebijakan Sosial Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Daerah melalui Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Klaten sebagai Upaya Menekan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(2), 129–140. <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i2.40657>
- 
-

- Manik, N. U. R. (2022). Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 407–414. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i8.98>
- Masud, F. (2020). PENGARUH KEADILAN DISTRIBUTIF DAN KEADILAN PROSEDURAL TERHADAP KOMITMEN AFEKTIF MELALUI POWER DISTANCE SEBAGAI VARIABEL MODERATING. <https://repository.unimma.ac.id/2305/>
- Masud, F. (2023). IMPLIKASI PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP JAMINAN KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/7852/>
- Mas'ud, F. (2024). OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DALAM PROGRAM BEASISWA BSI SCHOLARSHIP INSPIRASI DI BSI MASLAHAT. <https://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/4164>
- Milles, B. M. (2023). *Qualitative Data Analysis*. <https://vivauniversity.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/11/milesandhuberman1994.pdf>
- Muchtar, M. A. F. (t.t.). *Kompleksitas Pelaksanaan Distribusi Bantuan Sosial untuk Korban Banjir oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo*.
- Pahrudin, Z. S., Fitri, A. N., & Gusti, S. A. R. (2024). Pemerataan Ekonomi melalui Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat*, 1(1), 8. <https://doi.org/10.47134/jpem.v1i1.235>
- Prasetyo, T. D., Merini, D., & Wulandari, S. (2024). DIGITALISASI PENYELENGGARAAN BANSOS: STUDI TENTANG STRATEGI DAN TANTANGAN DI INDONESIA.
- Sabila, P. (2025). *Peran Bantuan Sosial Dalam Mengurangi Ketimpangan Antar 34 Provinsi Di Indonesia Pada Tahun 2018-2024*. <https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema/article/view/1372?>
- Setiadi, D., Julianto, R., & Siswanto, R. (2024). *Optimalisasi Sistem Informasi Pendataan Bantuan Sosial Berbasis Web untuk Meningkatkan Ketepatan Sasaran*. 2(2).
- Shoemith, D., Franklin, N., & Hidayat, R. (2020). Decentralised Governance in Indonesia's Disadvantaged Regions: A Critique of the Underperforming Model of Local Governance in Eastern Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(3), 359–380. <https://doi.org/10.1177/1868103420963140>
- Sintha, M. (2024). Dari Data ke Dana: Proses Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kota Palangka Raya. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v7i1.7802>